

ABSTRAK

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH ACEH**

OLEH :

Drs. Saluddin Al Cassany,MM

Kartini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan (DPRA) tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatip, yaitu mengetahui pengaruh variable independen dengan variable dependen. Sampel penelitian ini sebanyak 39 orang responden, dengan menggunakan metode sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kriteria ikut diteliti. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Data hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalaman Dewan (DPRA) tentang Anggaran berpengaruh positif terhadap Pengawas Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh . Hasil uji- t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan koefisien sebesar 0.768 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Disamping itu, hasil uji R pada *Model Summary* menunjukkan sebesar ($R \text{ square}$) : 0.536. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dipengaruhi faktor pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran sebesar 53, 6 %, relative kuat. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi pengaruhnya relative kuat.

Kata Kunci : Pengalaman Dewan (DPRA), Pengawas keuangan daerah (APBD).

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Hal ini bertujuan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat seimbang dan merata, serta dapat tercipta kesinambungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Disamping itu, dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tersebut, yang lebih penting lagi dan memberikan dampak positif kepada pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan wewenang sepenuhnya disamping sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. juga dituntut pengawasan keuangan daerah agar pemerintah berkewajiban mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahannya. Hal ini merupakan salah satu aspek penting bagi DPRD agar terjadi manajemen pengawasan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

Selain Undang-undang diatas, Pengawasan terhadap anggaran juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 132 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut merupakan tindakan DPRD untuk mengawasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini dimaksudkan supaya APBD dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan efisien dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD banyak faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, diantaranya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari tentang mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pengetahuan dewan tentang peraturan perundang undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) (Dewi, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) meunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang

anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian lain oleh Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD.

Berdasarkan penjelasan tentang peran DPRD sebagai legislatif dalam pelaksanaan salah satu fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dewan tentang anggaran. Semakin tinggi pengetahuan DPRD tentang anggaran maka semakin tinggi tingkat pengawasan APBD oleh DPRD. Namun pada kenyataannya masih terjadi banyak kasus lemahnya pengawasan keuangan daerah oleh dewan (DPRD), salah satunya adalah di DPRD Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pertamasekali dibentuk pada Tahun 1945 yang saat itu bernama Komite Nasional Daerah (KND), hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 dan di susul maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945. Kresidenan Aceh dijadikan provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai dengan PP No.8 Tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948 dan DPRD Aceh berdiri sesuai dengan PP. No. 22 tahun 1948. Kemudian Provinsi Aceh lahir kembali sesuai dengan UU No.24 Tahun 1956, maka dibentuklah DPRD, namun demikian setelah perjanjian damai helsinki dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006, maka nama DPRD dirubah menjadi DPR Aceh. DPRA dalam mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui pansus yaitu DPRA melakukan pengecekan secara langsung kepada objek proyek untuk menilai pelaksanaan proyek tersebut. Pansus ini dilakukan setiap tahun. Disamping itu, DPRA mengadakan kunjungan kerja kepada masyarakat (reses) untuk mengetahui sejauh mana pembangunan proyek yang telah dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga membuat laporan pertanggung jawaban kepada DPRA setiap Tahun.

Namun, menurut pengamatan penulis bahwa fungsi pengawasan keuangan APBD Aceh oleh anggota DPRA Aceh selama ini masih relatif rendah. Hal ini merupakan fenomena atau permasalahan bagi anggota DPRA selama ini. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hasil audit laporan pertanggung jawaban keuangan Gubernur Aceh selama ini dengan Opini WDP yaitu wajar dengan pengecualian, artinya masih terjadi penyimpangan dan belum mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku baik penggunaan dana dan pelaporannya oleh eksekutif dalam hal ini Pemerintah Aceh, namun demikian Opini BPK Aceh Tahun 2015 mendapat prediket wajar tanpa pengecualian (WTP), artinya tidak terjadi penyimpangan secara signifikan penggunaan APBD oleh Pemerintah Aceh, karena pengawasan keuangan Pemerintah Aceh oleh DPRA telah menunjukkan peningkatan artinya relatif mulai baik. Dapat dikemukakan bahwa Rendahnya pengawasan yang lalu oleh DPRA dipertidksi disebabkan rendah pengetahuan DPRA tentang anggaran baik sejak penyusunan anggaran maupun dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Rendahnya pengetahuan Anggota DPRD Aceh terlihat dalam pengesahan APBD Aceh oleh anggota dewan yaitu rata-rata terlambat yaitu tidak sesuai dengan waktu seharusnya penyusunan anggaran, sehingga waktu pelaksanaan oleh eksekutif relative pendek. Kejadian ini rata-rata terjadi setiap tahun. Hal ini menunjukkan rendahnya

pengetahuan anggota dewan dibidang anggaran, sehingga pengawasan anggaran oleh DPRA belum optimal dalam pengawasan Keuangan APBD Aceh. Rendahnya pengetahuan dewan diprediksi karena terkendala pada tingkat pendidikan anggota dewan yang bervariasi dan selama ini pengalaman bekerja dibidang anggaran sebagai anggota dewan relatif pendek.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan APBD Pemerintah Aceh.**

LANDASAN TEORI

1. Pengawasan Keuangan Daerah

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung-jawabannya. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya Mulyana (2010) dalam Sri Rustyaningsih (2014:16) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah sebagai berikut :

- (1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan.
- (2) Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.
- (3) Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan

2. Anggota Dewan Sebagai Pengawas Anggaran

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah pengawasan terhadap keuangan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dimaksudkan bukanlah terkait dengan pemeriksaan tapi lebih kepada pengawasan untuk menjamin kualitas terhadap sasaran program yang telah ditetapkan dalam APBD.

Hal ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dalam Sri Rustyaningsih (2014:18) yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan oleh DPRD dilakukan pada tahap awal. Ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, maka pemberian wewenang

tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dioptimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk *socialcontrol*. Hal ini berarti pihak DPRD merupakan pengawas eksternal yang bertujuan untuk tercapainya sasaran APBD yang telah dicanangkan/

Menurut Roseptalia (2006) dalam Sri Rustiyaningsih (2014:22) bahwa Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaranyang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD. Dalam tahap ratifikasi anggaran, peran DPRD hendaknya tidak lagi sebagai "tukang stempel" saja, namun harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan di kuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan.

3. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dan indikator yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPB), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudoyono, 2002). dalam Sri Rustiyaningsih (2014:26). Kemampuan kerja aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahliannya. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan serta memperluas pengalaman aparatur melalui studi banding ke tempat lain.

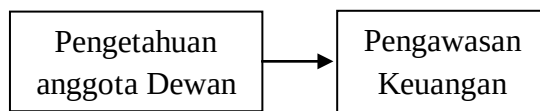
Untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan dan seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir mengarahkan penelitian dalam pelaksanaannya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka konseptual .

Menurut Sugiyono, (2008:47) mengatakan bahwa kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teori pertautan/hubungan antara variable independen dan dependen. Pertautan antar variable dirumuskan ke dalam bentuk pradigma penelitian. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka kerangka konseptual mengemukakan deskriptif teori untuk masing-masing variable dan tidak perlu membuat pradigma penelitian.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengetahuan anggota DPR Aceh tentang anggaran Terhadap pengawasan Keuangan APBD Aceh. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram, Gambar 2.1



Gambar Kerangka Konseptual

5. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:87) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut;

H_0 = Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan APBD Aceh.

H_a = Pengetahuan Anggota Dewan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan APBD Aceh

METODE PENELITIAN

1. Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek-objek penelitian yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek peneliti itu. .

Berdasarkan teori tersebut, maka populasi penelitian mengacu pada anggota DPR Aceh berjumlah 81 orang ,dan untuk menetapkan sampel penelitian peneliti menetapkan kriteria sebagai berikut :

1. Unsur Pemimpin Dewan. Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

2. Sekretaris Dewan. Perwakilan Rakyat Aceh
3. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dari kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah populasi yang memenuhi syarat Untuk dijadikan sampel adalah berjumlah 39 orang yang terdiri dari :

Unsur pimpinan 1 orang, sekretaris dewan 1 orang dan Anggota badan anggaran dewan 34 orang, oleh karena sampel/responden relative kecil, maka metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu semua populasi yang memenuhi kreteria dijadikan sampel penelitian dan ikut diteliti, (Sugiyono, 2008:78)

2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. yaitu :

1). Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.

a. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden. Dan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan. Skala pengukuran penelitian dilakukan dengan *skala likert*, dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5. Skala pengukuran ini dipilih peneliti agar responden memiliki kesempatan atau keleluasaan yang lebih besar (nilai maximum 5) dalam memberikan penilaian yang sesuai dengan persepsi dan kondisi yang mereka alami.

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan serta dapat berguna bagi penyusunan penelitian ini. Studi pustaka juga merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya bersal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1 Variabel penelitian

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan APBD(Y).

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X).

3.2. Definisi Operasional

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007). Instrumen tersebut berisi tiga butir pertanyaan yang mengukur pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu: mengetahui tata cara pelaksanaan APBD, memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan yang terkait, dan mampu untuk mendeteksi, serta mengidentifikasi, pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran. Responden diminta untuk memilih skala nilai satu sampai lima pada setiap pertanyaan. Berdasarkan jawaban responden dapat diukur apakah pengetahuan dewan tentang anggaran menerapkan sentralisasi (ditunjukkan dengan skor rendah) atau desentralisasi (ditunjukkan dengan skor tertinggi).

1. Pengawasan Keuangan Daerah APBD

Variabel pengawasan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007). Instrumen tersebut berisi empat butir pertanyaan yang mengukur pengawasan keuangan daerah yaitu: pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan, pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran. Responden diminta untuk memilih skala nilai satu sampai lima pada setiap pertanyaan. Berdasarkan jawaban responden dapat diukur apakah pengawasan keuangan daerah menerapkan sentralisasi (ditunjukkan dengan skor rendah) atau desentralisasi (ditunjukkan dengan skor tertinggi).

Variabel penelitian terdiri dari Pengetahuan anggaran anggota dewan sebagai variabel terikat, dengan Pengawasan Keuangan APBD sebagai variabel bebas. Masing-masing variabel dioperasionalkan seperti terlihat dalam table berikut ini:

Tabel Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item
Independen						
1	Pengetahuan anggota DPR Aceh tentang anggaran	Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran	Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD	1-5	Interval	A1
			Memiliki pemahaman penyusunan APBD berdasarkan peraturan yang terkait	1-5	Interval	A2
		(RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.	Mampu mendeteksi dan mengidentifikasi pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran	1-5	Interval	A3

		(Yudojono B (2002: 11))				
Dependen						
2	Pengawasan keuangan APBD Aceh	Pengawasan keuangan APBD yang dilakukan oleh Anggota dewan adalah penting dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun benar benar dijalankan agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar benar dapat dipertanggungjawabkan. (Roseptalia, (2006: 10))	Pengawasan menyusun saat	1-5	Interval	B1
			Pengawasan pengesahan saat	1-5	Interval	B2
			Pengawasan pelaksanaan saat	1-5	Interval	B3
			Pengawasan saat pertanggungjawaban	1-5	Interval	B4

3.4. Uji Validitas dan Reabilitas (Kehandalan)

3.4.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan suatu alat pengukur itu untuk apa yang ingin di ukur (Umar, 2004:103). Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah, Pengetahuan anggota dewan dan pengawasan Keuangan APBDbetul-betul valid. Untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun memiliki validitas atau tidak, sehingga instrumen yang diharapkan konsisten. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan formula korelasi *Product Moment* dari *Pearson* antara skor setiap item dengan skor total dari item-item tersebut dengan bantuan SPSS (*Statistical Product for Service Solution*). Apabila nilai korelasi (r-hitung) lebih besar dibandingkan dengan nilai (r-tabel) pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa item-item pertanyaan/pernyataan tersebut valid.

3.4.2. Uji Reabilitas (Kehandalan)

Untuk mengukur Reabilitas (kehandalan) kuesioner, digunakan uji reabilitas. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *crochbach alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variable yang ada. Uji ini dimaksud untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga dapat dipakai dengan baik kondisi yang berbeda-beda. Ukuran reabilitas dianggap handal berdasarkan *croncbach alpha* sebesar 0,60 (Malhotra, 2005)

3.5. Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran *standardized* pada kurva P-P plots, bila *standarized residual* berada pada kisaran garis normal, maka data mempunyai distribusi normal (Santoso,2007:258). Apabila data berdistribusi normal, maka digunakan stastistik parametrik, sebaliknya apabila tidak berdistribusi normal, maka digunakan stastistik non-parametrik.

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah variasi data yang digunakan untuk membuat model tidak konstan atau yang menunjukkan semakin besarnya variasi seiring dengan membesarnya nilai X dan Y. Heteroskedastisitas terjadi bila variasinya tidak konstan, sehingga seakan-akan ada beberapa kelompok data yang mempunyai besaran error yang berbeda-beda.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Gouzali,2005:11). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Gouzali,2005:11).

3.6 Metode Analisis Data

Instrumen yang digunakan untuk dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara pengetahuan anggaran anggota dewan sebagai variabel independen dengan Pengawasan Keuangan APBD sebagai variabel dependen adalah regresi linier sederhana. Gujarati (2006: 130) regresi linier sederhana dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y=Pengawasan Keuangan APBD Aceh

A = konstanta

X=PengetahuanAnggota Dewan atas Anggaran

b = koefisien regresi untuk variabel X

e =Error term

Untuk mengetahui besarnya keeratan hubungan antara variabel independen (Pengetahuan anggota dewan atas anggaran) dengan variabel dependen (Pengawasan keuangan APBD) digunakan koefisien korelasi (R).

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel bebas pengetahuan anggaran Dewa (X) secara individual terhadap variabel terikat (Y)Pengawasan Keuaangan APBD Aceh, dengan kriteria pengujian :

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka menerima H_a dan menolak H_o pada tingkat signifikansi 5%

Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka menolak H_a dan menerima H_o pada tingkat signifikansi 5% (lima persen)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskripti.

. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PGNWS			
KEU	4.1821	0.34403	39
DRH			
PENGL			
MN	3.8879	0.32801	39
DWN			
ANGRN			

Sumber : Data primer (diolah), 2015

Dari tabel di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 39 responden. Variabel Nilai pengalaman dewan tentang anggaran (mean) sebesar 3.8879. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman dewan yaitu relative baik., sedangkan nilai pengawasan keuangan daerah 4.1821, berarti bahwa pengawasan keuangan daerah yang dicapai sebesar 4.1821, relative baik.

Standar deviasi untuk masing-masing variabel adalah 1) pengalaman dewan tentang anggaran 0.328012) pengawasan keuangan daerah 0.34403. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas,

yang berarti pernyataan dalam variabel tersebut semakin bervariasi. Semakin rendah tingkat standar deviasinya maka semakin homogen artinya bahwa variasi jawaban atau pernyataan semakin kecil.

2. Hasil Uji Validitas dan Realibitas

2.1. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas data pada tabel berikut ini

Tabel Hasil Uji Validitas Data

a. Variabel Pengetahuan Dewan ttg Anggaran (X)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kristis (r_{tabel})
B1	0.356	0.320
B2	0.697	0.320
B3	0.569	0.320
B4	0.794	0.320
B5	0.682	0.320
B6	0.338	0.320
B7	0.775	0.320
B8	0.339	0.320
B9	0.591	0.320
B10	0.548	0.320
B11	0.704	0.320
B12	0.462	0.320

b. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kriostis (r_{tabel})
------	---	--------------------------------

B1	0.558	0.320
B2	0.594	0.320
B3	0.709	0.320
B4	0.709	0.320
B5	0.417	0.320
B6	0.631	0.320
B7	0.576	0.320
B8	0.656	0.320
B9	0.721	0.320
B10	0.421	0.320

Sumber: Data Primer 2015, (diolah)

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masingmasing item dari variabel pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) berada diatas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi >0.320 , sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

2,2, Hasil Uji Reabilitas

.Dalam tabel berikut ini disajikan hasil uji reabilitas.

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Data

N o	Variabel	Rata- rata	Juml ah Item	Nilai Alph a	Kean dalan
1	Pengalam an dewan		12	0.863	Hand al
2	Pengawas an keuangan daerah		10	0.871	Hand al

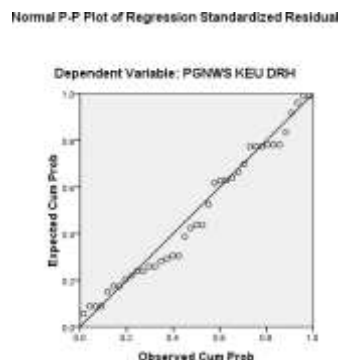
Sumber: Data Primer 2015 (diolah)

Berdasarkan reliability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya sama atau lebih besar dari Alpha 0.50, (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan.

2.3. Hasil Uji Normalitas

Dalam gambar berikut ini disajikan uji normalitas t sebagai berikut :

Gambar Hasil Uji Normalitas



Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2.4, Hasil Uji Hipotesis

2.4.1. Hasil Pengujian Regresi

Untuk menguji pengaruh pengalaman dewan (DPRA) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh digunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS {*Statistical Package for Social Science*} 17.0 for Windows Evolution Version, pengaruh variabel iendependen terhadap variable dependen secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Coefficients ^a					
	Unstandar dized Coefficient ts	Standardized Coefficients		t	
Model	B	Std. Error	Beta		Sig.
1 (Consta nt)	1.197	0.458		2.612	0.013
PENGL MN DWN ANGRN	0.768	0.117	0.732	6.534	0.000

a. Dependent
Variable: PGNWS
KEU DRH

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS

(Statistical Package for Social Sciences) versi 17.0 seperti terlihat pada Tabel 4.5 di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.197 + 0.768X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diketahui hasil penelitian yaitu : nilai konstanta sebesar 1.197, artinya bilamana faktor pengalaman dewan tetap, maka pengawasan keuangan daerah (ABPD) Aceh mengalami kenaikan sebesar 1.197 .

Pengalaman dewan (DPRA) mempunyai koefisien (b) sebesar sebesar 0.768 yang berarti koefisien regresi yang diperoleh tidak sama dengan nol ($b_1 \neq 0$). Artinya setiap satuan perubahan dalam variabel pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran akan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh pada Pemerintah Aceh sebesar 0.76

4.6.2 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dalam regresi linear digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Priyanto, 2008). Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel Hasil Analisis Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.732 ^a	0.536	0.523	0.23756	0.447

a. Predictors: (Constant), PENGLMN

DWN ANGRN

b. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Sumber : Data primer (diolah), 2015

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa :

a) nilai koefisien korelasi/hubungan (R) : 0.732^a, relative kuat dan pengaruh (R Square) = 0.536. Hal ini berarti bahwapengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dipengaruhi faktor pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran sebesar 53, 6 %, relative kuat. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi pengaruhnya relative kuat.

4.6.3 Uji Secara Parsial.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dilakukan uji secara parsial (uji t). Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini

Tabel Pengujian Hipotesis secara Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.197	0.458		2.612	0.013
PENGLMN					
DWN	0.768	0.117	0.732	6.534	0.000
ANGRN					

a. Dependent Variable: PGNWS KEU

DRH

Berdasarkan table diatas maka koefisien regresi secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil pengujian data diketahuai bahwa pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran mempunyai $t_{hitung} = 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variable pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh.

4.7. Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien X (pengalaman dewan) mempunyai t_{hitung} sebesar $= 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan koefisien sebesar 0.768. Hal ini menunjukkan bahwa, artinya pengalaman dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh Jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Disamping itu makna lain yang terkandung adalah bahwa pengaruh pengalaman dewan tentang anggaran terhadap pengawasan

keuangan daerah adalah sebesar 0.536 atau 53.6 %, relative kuat karena di atas 50 %. Artinya bahwa sebagian besar variable pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh pengalaman dewan tentang anggaran dan sebagian lagi (46.4 %. dipengaruhi oleh variable lain, seperti fungsi internal control, pengawasan Bepeka.

Disamping itu, makna lain yang terkandung dengan hasil penelitian ini adalah bahwa hubungan variable pengetahuan dewan (DPRA) dengan pengawasan keuangan daerah (R) cukup kuat atau relative kuat yaitu sebesar 73.2 % (0.732) namun pengaruhnya 53.6 %, yaitu kuatnya relative sedang dan belum optimal.. Hal ini berarti bahwa anggota dewan (DPRA) telah menyadari dan hubungan pengalaman anggota dewan (DPRA) dibidang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah telah dilaksanakan / berjalan dengan baik, namun karena pengalaman dibidang anggarannya masih rendah sehingga belum memberi pengaruh yang signifikan atau pengaruhnya menuju kuat, terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh,

Disamping itu, semakin kuatnya pengaruh pengalaman anggota dewan (DPRA) dalam mengendalikan atau mengawasi keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh, hal ini berarti pelaksanaan anggaran (APBD) oleh Pemerintah Aceh telah relative baik dan tidak terjadi penyimpangan yang berarti atau merugikan masyarakat, namun dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan dengan pringkat nilai baik

sekali atau unggul. Hasil audit Bepeka Aceh untuk laporan keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 diberikan opini atau penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini juga bukti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan (DPRA) telah relatif baik.

Selanjutnya makna lain adalah bahwa anggota dewan (DPRA) dalam penyusunan anggaran telah bersifat realistis dan fleksibel, sehingga terwujud pengawasan DPRD yang efektif, efisien dan berdaya guna, karena anggaran yang realists adalah alat pengawasan yang paling baik dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan, namun kekurangan masih terjadi yaitu masih dilakukan perubahan anggaran diakhir tahun, karena anggaran diprediksi tidak dapat akan terwujud sebagaimana mestinya. yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena anggaran telah disusun dengan realists dan pengawasan DPRD berfungsi secara maksimal, terkeuali alasan diluar kemampuan manusia seperti bencana alam dan sebagainya.

Disamping itu, makna lain yang terkandung dalam penelitian ini adalah bahwa anggota DPRA telah mampu secara objektif dan transparan menilai kinerja pelaksanaan anggaran oleh eksekutif Pemerintah Aceh. Penilaian kinerja Pemerintah Aceh oleh DPRA adalah sangat penting, karena merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan. Jadi kalau pengalaman DPRA tentang anggaran relative baik, maka fungsi pengawasan keuangan pembangunan akan relatif baik. Hal ini akan mengakibatkan

penilaian kinerja kepada pelaksana anggaran dapat dilakukan secara objektif dan benar. Namun masih terkandung kelemahan yaitu pihak DPRA, belum mampu mengukur rasio jumlah dana APBD yang meningkat setiap tahun dengan nilai atau hasil untuk kepentingan masyarakat Aceh, apakah sebanding dengan dana yang dianggarkan dengan nilai yang diperoleh masyarakat atau dana digunakan tidak untuk kepentingan masyarakat atau masih terjadi pemborosan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ternyata masih banyak rakyat Aceh yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan. Hal ini berarti bahwa sasaran anggaran yang disusun oleh DPRA sudah baik namun belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Makna lain yang terkandung adalah penyusunan anggaran oleh anggota dewan telah berjalan baik yaitu anggaran disusun berdasarkan realistis atau kinerja sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai wujud dari penjabaran rencana strategis (renstra), visi dan misi Pemerintahan daerah yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan peningkatan setiap tahun dalam 4 tahun terakhir ini walaupun masih terjadi kekurangan kekurangan seperti lambatnya pengesahan anggaran oleh DPRA dan sebagainya. Disamping itu, Pihak eksekutif yaitu Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan anggaran telah didukung dengan sumber daya yang memadai, baik kualitas maupun

kuantitasnya, sehingga pengawasan anggaran oleh DPRA telah berjalan dengan baik

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial terdapat pengaruh yang positif pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh. Hasil uji $t_{hitung} = 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan koefisien sebesar 0.768. Hal ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya terjadi peningkatan pengalaman dewan DPRA) dibidang anggaran akan mempengaruhi tingkat pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh.

2. Hubungan antara variabel pengalaman dewan (DPRA) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh relative kuat, hal ini dapat dilihat hasil uji R pada *Model Summary* yaitu sebesar 0.732^a atau 73,2 % , yaitu di atas 50 % dan mendekati 100 %, jadi hubungan positif dan relative kuat.

2. Saran

1. Disarankan kepada Pengawas Pemilu Aceh, perlu ditetapkan kriteria atau persyaratan secara khusus bagi calon anggota DPRA seperti memenuhi persyaratan atau pengalaman dibidang anggaran, memiliki pendidikan serendahny strata 1 (sarjana), dan sebagainya, sehingga anggota dewan (DPRA) benar-benar mampu melaksanakan fungsinya sebagai pengawas keuangan (APBD) Pemerintah Aceh.

2. Disarankan kepada Partai Politik di Aceh, yaitu setiap mencalonkan anggota DPR dari partainya sebaiknya ditetapkan secara selektif. Selama ini partai politik menetapkan calon berdasarkan figure kepemimoinannya di masyarakat, dan tidak diseleksi dengan persyaratan khusus lainnya. Setelah menjadi anggota DPRA ternyata kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah APBD Aceh, apalagi anggota DPRA tersebut tidak mempunyai pengalaman dibidang anggaran, dan tidak memahami mekanis penyusunan anggaran.

3. Disarankan kepada eksekutif Pemerintah Aceh, agar mengusulkan pandangan umum kebijakan anggaran dan pendapatan kepada DPRA Aceh lebih cepat sehingga anggota DPRA masih banyak waktu dalam penyusunan anggaran meengingat tidak semua anggota DPRA mengerti tentang mekanis penyusunan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2014). Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: Panel Data Evidence dari Sembilan Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMBiS)*, 2(2), 438-450.
- Banta, Z. (2014). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(1), 120-137.

- Coryanata, I. (2007.) Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, (Online), Hlm. 1-24, (<http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP>, diakses 28 April 2013).
- David. (2006.) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government Nonprofit Social Service Contracting Relationship (Online). (<http://oied.ncsu.edu>, diakses 17 Maret 2014)
- Donaldson, L. dan Davis, J. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns* (Online). Vol 16 No.1 (<http://faculty.wvu.edu/dunnc3/rprnts.stewardshiporagency.pdf> di akses 14 Maret 2014)
- Ghozali, I. (2009.) *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim dan Abdullah. (2006.) *Hubungan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah*. (Online), Vol 2 No 1 hlm.53-64. (http://www.academia.edu/1798363/halim_dan_abdullah, diakses 9 Maret 2014)
- Halim, A. (2012.) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Juliastruti, A. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. (Online), (<http://unp.ac.id>, diakses 29 April 2013)
- Mappong, S. (2013) *Tujuh Daerah Di Sulsel Raih WTP*, (Online) (<http://antarasulsel.com> diakses 10 November 2013)
- Kesuma, I., & Abad, A. (2015). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Banda Aceh (Studi Pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 6(2), 64-72.
- Mardiasmo. (2004.) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mukhtar, M., & Wali, M. (2014). Sistem Harga Pokok Produksi dengan Pendekatan Job Order Costing dan Pengaruhnya Terhadap Laba Usaha. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMBiS)*, 2(2), 345-355.
- Pramono, A.H., (2002), *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Priyatno, D. (2013). *Mandiri belajar analisis data dengan SPSS*. Jakarta: PT Buku Seru
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. (Online), Vol. 2 No.1. (<http://penafokus.ac.id>, diakses 10 Februari).
- Rahman, R., & Yunaedi, D. (2014). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Pemerintah Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(2), 48-64.
- Ramli, M. (2014). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(2), 84-103.

- Sopannah, dan Isa, W.(2007.) *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah(APBD)*. (Online), (<http://umm.ac.id>, diakses 29 April 2013).
- Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sunyoto,D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwardjono. (2010.) *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*.Yogyakarta: BPFE.
- Sulangga, I. (2014). Analisis Pengendalian Interen (Intenal Conrol) Dalam Penelolaan Dana Pendidikan Aceh (Studi Pada Dinas Pendidikan Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(1), 1-19.
- Werimon, S. (2007.) *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan TransparansiKebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, (Online) Hlm. 1-22, (<http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASP> P, diakses 28 April 2013)
- Widyaningsih, A. dan Pujirahayu, I. (2012.)*Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Pendapatan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating*.(Online), Vol .2, No.1, (<http://bakrie.ac.id>, diakses 30 April 2013).
- Yahya, I. (2006.) *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.(online), (<http://repository.usu.ac.id>, diakses 15 Mei 2013)
- Yudoyono, B. (2002,) *Optimalisasi Peran DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (online), (<http://www.bangda.depdagri.go.id>, diakses 30 April 2016)